



Kerangka Kerja Sekolah Siaga Bencana

Kerangka kerja ini disusun bersama oleh
**KONSORSIUM PENDIDIKAN BENCANA
INDONESIA**

DAFTAR ISI

	Hal.
Daftar Isi	i
Kata Pengantar	1
BAB I. Pendahuluan	3
BAB II. Konsep Sekolah Siaga Bencana	8
2.1. Definisi	
2.2. Konsep Dasar	
2.3. Tujuan	
BAB III. Parameter, Indikator, dan Verifikasi	10
3.1. Sikap dan Tindakan	
3.2. Kebijakan Sekolah	
3.3. Perencanaan Kesiapsiagaan	
3.4. Mobilisasi Sumber daya	
BAB IV. Pedoman Pengembangan Sekolah Siaga Bencana	16
4.1. Nilai-Nilai dan Prinsip-Prinsip	
4.2. Peran dan Tanggung Jawab	
4.3. Prasyarat Pendukung	
4.4. Langkah-Langkah	
Daftar Istilah	20
Daftar Pustaka	23
Daftar Anggota Gugus Tugas KPB untuk Konsep Sekolah Siaga Bencana	24
Sekilas tentang Konsorsium Pendidikan Bencana	25

KATA PENGANTAR

Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 Tahun 2002 memandatkan pentingnya pendidikan dan perlindungan secara khusus bagi anak-anak. Maka, menjadi kewajiban pemerintah dan pihak-pihak yang berwenang, serta lembaga-lembaga kompeten dan peduli untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pendidikan dan perlindungan khusus tersebut.

Di dalam kaitannya dengan upaya penanggulangan bencana di Indonesia, sekolah sebagai ruang publik memiliki peran nyata dalam membangun ketahanan masyarakat¹. Sekolah sebagai satuan pendidikan memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan. Sekolah secara sadar dan terencana melakukan upaya mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dalam hal ini sekolah tetap terpercaya sebagai wahana efektif untuk membangun budaya bangsa, termasuk membangun budaya kesiapsiagaan bencanawarga negara; yakni secara khusus kepada anak/murid, pendidik, tenaga kependidikan, dan para pemangku kepentingan lainnya, dan secara umum kepada masyarakat luas.

Dalam upaya mendorong sekolah untuk membangun kesiapsiagaan bencana, pelbagai lembaga/institusi telah melakukan berbagai kegiatan/program pendidikan pengurangan risiko bencana di tingkat sekolah dengan metodologi yang dikembangkan masing-masing. Konsorsium Pendidikan Bencana (KPB) mencatat berbagai program dan terminologi yang dipakai seperti Sekolah Siaga Bencana (SSB), Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Sekolah (PRBBS), atau Sekolah Ramah Anak (SRA).

Menyadari keragaman yang ada yang memperkaya pelaksanaan pendidikan PRB, KPB sebagai wadah koordinasi antar para pelaku pendidikan PRB di Indonesia, memandang perlu adanya dokumen yang mampu menjelaskan konsep sekolah siaga bencana. Diharapkan, dokumen tersebut dapat disepakati oleh para pemangku kepentingan dalam pendidikan PRB dan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan, utamanya bagi anggota KPB.

Konsep SSB sebagai upaya membangun kesiapsiagaan sekolah yang dikembangkan untuk menggugah kesadaran atas risiko bencana di sekolah bagi seluruh pemangku kepentingan dalam bidang pendidikan, baik individu maupun kolektif di sekolah dan lingkungan sekolah. Kesiapsiagaan sebagai salah satu upaya yang dibangun untuk mengantisipasi dan mengelola ancaman untuk meminimalisasi dampak/risiko bencana. Pengarusutamaan PRB dalam sistem pendidikan nasional menjadi pendekatan dalam

¹ Draft Kerangka Kerja Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Sekolah, KPB, Oktober 2008.

pengembangan konsep SSB ini yang memiliki lingkup kerja mencakup delapan standar sesuai Standar Nasional Pendidikan.

Proses penyusunan konsep SSB ini dilakukan oleh KPB melalui Gugus Tugas SSB KPB yang terdiri dari 15 anggota KPB (Lampiran 1). Semenjak 17 Desember 2009, gugus tugas ini mengadakan pertemuan rutin dalam rangka pematangan dan finalisasi dokumen konsep ini. Keanggotaan gugus tugas terdiri dari pelbagai lembaga/organisasi; pemerintah, organisasi kemasyarakatan, organisasi non-pemerintah nasional dan internasional, serta badan-badan PBB.

Kami berharap tersusunnya dokumen Konsep SSB ini dapat memudahkan para pihak, dan khususnya anggota KPB, dalam menjalankan kegiatan pendidikan PRB. Diharapkan pula bahwa dokumen ini dapat menjadi rujukan bagi sekolah sebagai wadah serta wahana dalam membangun ketangguhan masyarakat untuk selanjutnya menjadi kepedulian para pemangku kepentingan dalam melakukan kerja-kerja advokasinya.

Jakarta, Mei 2011

Konsorsium Pendidikan Bencana

BAB 1 PENDAHULUAN

Latar Belakang²

Tahun 2005, Konferensi Dunia untuk Pengurangan Risiko Bencana (*World Conference on Disaster Reduction*) diselenggarakan di Kobe, Jepang. Dari konferensi lintas-negara ini disusun dan disepakati kerangka kerja aksi bersama untuk pengurangan risiko bencana hingga tahun 2015. Kesepakatan tentang misi membangun ketahanan negara dan masyarakat terhadap bencana tersebut dikenal sebagai Platform Global untuk Pengurangan Risiko Bencana dengan Kerangka Kerja Hyogo 2005-2015 (*Hyogo Framework for Action/HFA 2005-2015*).

Kerangka aksi itu merekomendasikan 5 prioritas tindakan untuk dilakukan oleh suatu negara yakni: (1) Memastikan bahwa pengurangan risiko bencana (PRB) ditempatkan sebagai prioritas nasional dan lokal dengan dasar institusional yang kuat dalam pelaksanaannya; (2) Mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memonitor risiko-risiko bencana dan meningkatkan pemanfaatan peringatan dini; (3) menggunakan pengetahuan, inovasi, dan pendidikan untuk membangun suatu budaya aman dan ketahanan pada semua tingkatan; (4) Mengurangi faktor-faktor risiko dasar; dan (5) Memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana dengan respon yang efektif pada semua tingkatan. Memperkuat kapasitas-kapasitas pada tingkat komunitas untuk mengurangi risiko bencana pada tingkat lokal, dimana individu dan komunitas memobilisir sumberdaya lokal untuk upaya mengurangi kerentanan terhadap bahaya.

Semenjak itu, Platform Global terus mendorong implementasi dan kerjasama dalam pengupayaan pengurangan risiko bencana dalam pembangunan di negara-negara. Juni 2009, misalnya, platform ini mendorong penekanan pentingnya pengurangan risiko bencana dalam pengelolaan dampak perubahan iklim dan pencegahan tergerusnya kesejahteraan sosial dan ekonomi akibat bencana. Platform ini juga menyoroti makin meningkatnya kemauan politik (*political will*) dalam melakukan upaya pengurangan risiko bencana. Pemerintah maupun masyarakat sipil didorong untuk mengimplementasikan praktik pembangunan *bottom-up* yang menempatkan masyarakat sebagai pihak paling mengenal dan menyadari atas bahaya yang mereka hadapi, sehingga masyarakat memiliki kemampuan untuk mengelola dan melakukan tindakan-tindakan konkrit.

Sejalan dengan perkembangan gerakan global, pemerintah dan masyarakat sipil Indonesia pun bergerak aktif untuk membangun Platform Nasional untuk Pengurangan

²Disarikan dari Naskah Akademik Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana dalam Sistem Pendidikan Nasional, Gugus Tugas KPB, Juli 2009.

Risiko Bencana (Planas PRB). Platform ini adalah wadah untuk membangun koordinasi bagi pelbagai pemangku kepentingan PRB di Indonesia. Setelah Planas terbentuk, di beberapa provinsi pun berdiri Platform Daerah/Forum PRB. Terbentuknya platform-platform tersebut menjadi indikasi kesadaran masyarakat tentang pentingnya membangun ketangguhan bangsa hingga ke daerah-daerah maupun komunitas-komunitas.

Kebencanaan di Indonesia

Kepulauan Indonesia terbentuk dari titik-titik pertemuan lempeng bumi. Di bagian barat, lempeng Eurasia bertumbukan langsung dengan lempeng Indo-Australia, dan di bagian timur adalah pertemuan tiga lempeng yaitu lempeng Filipina, Pasifik dan Australia. Letak geografis yang demikian ini, menjadikan negeri ini 'sarat' dengan kejadian-kejadian bencana, seperti gempa bumi, tsunami, tanah longsor, serta gunung berapi. Selain itu, kerentanan Indonesia pun diyakini semakin meningkat dengan perubahan iklim global dan laju jumlah penduduk beserta pluralitas yang ada. Betapa tingginya tingkat risiko yang dihadapi dengan karaktergeografis, demografis, serta berbagai aspek lainnya.

Tahun 2009, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat adanya 1.306 kejadian bencana dengan jumlah total korban meninggal sebanyak 624 jiwa meninggal dan hilang, 5.570.928 orang yang menderita dan mengungsi akibat kejadian bencana tersebut, serta 77.975 rumah rusak³.

Gempa bumi Sumatera Barat, 30 September 2009, merupakan satu gambaran betapa besar kerugian yang ditimbulkan akibat bencana di Indonesia. Terhitung 1.195 orang meninggal dunia dan kerusakan 249.833 unit rumah (114.797 unit rusak berat), 2.512 unit fasilitas pendidikan (9.051 lokal), fasilitas kesehatan, 1.010 unit fasilitas pemerintahan, 2.104 unit fasilitas ibadah, 177 km jalan, 4,980 m jembatan, 25 unit hotel, sarana irigasi, pasar, putusnya jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan air bersih, serta sarana infrastruktur lainnya. Belum lagi dampak kerugian lain, yakni pada sisi psikologis masyarakat serta sendi-sendi kehidupan lainnya, seperti pendidikan, ekonomi, dan sosial⁴.

Menyadari dampak bencana, penting ditumbuhkan kesadaran dan pembudayaan pengurangan risiko bencana. Pemerintah pun mulai melakukan berbagai pengupayaan. Tahun 2006, Bappenas bekerjasama dengan Badan Koordinasi Nasional Penanganan

³ <http://www.bnpb.go.id>

⁴ Presentasi H. Sudirman Gani, Kepala Badan Kesbangpol & Linmas/Sekretaris Satkorlak PB, Provinsi Sumatera Barat dalam Lokakarya Evaluasi Penanganan Darurat Gempabumi Sumatera Barat, Padang 22-24 Desember 2009.

Bencana (BAKORNAS PB) dan didukung oleh United Nations Development Programme (UNDP) menyusun dokumen Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN PRB) 2006-2009. Dokumen ini berisikan komitmen upaya-upaya mengurangi risiko bencana di Indonesia. Komitmen pemerintah semakin nyata dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. UU PB dan turunannya menjadi panduan atau landasan yuridis dalam kerja-kerja penanggulangan bencana di Indonesia yang juga memandatkan visi membangun ketangguhan masyarakat terhadap bencana.

Selanjutnya, dengan dibentuknya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Platform Nasional untuk Pengurangan Risiko Bencana (Planas PRB), disusun dan ditetapkan dokumen RAN PRB 2010-2012 sebagai dokumen nasional yang merupakan panduan pelaksanaan pembangunan nasional dengan pengurangan risiko bencana sebagai prioritas. Dalam bidang pendidikan, misalnya, Pemerintah telah mendorong adanya alokasi 1% Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pengurangan risiko bencana, serta 20% untuk alokasi pendidikan sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.

Kebencanaan dan Sekolah

Tahun 2006, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan UNESCO melakukan penelitian di tiga wilayah, yaitu Kabupaten Aceh Besar, Kota Bengkulu, dan Kota Padang. Penelitian itu bertujuan melihat tingkat kesiapsiagaan bencana di dalam sekolah, rumah tangga, dan komunitas. Dengan 5 parameter kesiapsiagaan sekolah (pengetahuan tentang bencana, kebijakan dan panduan, rencana tanggap darurat, sistem peringatan bencana, dan mobilisasi sumber daya) ditemukan bahwa ternyata tingkat kesiapsiagaan sekolah lebih rendah dibanding masyarakat serta aparat⁵.

Dari temuan tersebut, dapat dibaca bahwa sekolah merupakan 'ruang publik' dengan tingkat kerentanan tinggi. Pengalaman gempa Sumatera Barat menunjukkan betapa besarnya dampak kerusakan sekolah, khususnya ruang kelas. Akibatnya, proses kegiatan belajar-mengajar secara normal pun terhenti. Hampir di sebagian besar wilayah Indonesia, sarana dan prasarana sekolah yang ada sangatlah rentan terhadap bencana. Selain infrastruktur bangunan sekolah, tak dapat dibayangkan apabila kejadian bencana terjadi pada jam-jam sekolah.

Gempa bumi 12 Mei 2008 di Sichuan, China, memberikan gambaran besarnya dampak ketika bencana terjadi di jam sekolah. Gempa berkekuatan 7,9 skala richter itu menewaskan 87.000 orang dengan sedikitnya 5.335 murid. Artinya, sekitar 6% korban tewas adalah anak-anak sekolah. Berdasar laporan media pemerintah Cina, lebih dari

⁵ Kajian Kesiagaan Masyarakat, LIPI, 2006-2007

7.000 bangunan sekolah runtuh dan menimbun para pelajar dan guru. Lebih ironisnya, banyak bangunan di sekitar sekolah yang masih tegak. Para orangtua korban pun menuding telah terjadi korupsi dalam pembangunan gedung sekolah. Karena mutu material bangunan buruk, maka banyak gedung sekolah runtuh ketika terjadi gempa tersebut.

Dari fakta di atas, maka pengupayaan kesiapsiagaan bencana di sekolah menjadi agenda penting bersama yang merupakan upaya dan tanggung jawab dari warga sekolah dan para pemangku kepentingan sekolah. Warga sekolah adalah semua orang yang berada dan terlibat dalam kegiatan belajar-mengajar: murid, guru, tenaga pendidikan dan kepala sekolah. Pemangku kepentingan sekolah adalah seluruh komponen masyarakat yang berkepentingan dengan sekolah, baik warga masyarakat maupun lembaga/institusi masyarakat sekitar sekolah.

Sekolah merupakan basis dari komunitas anak-anak. Mereka adalah pihak yang harus dilindungi dan secara bersamaan perlu ditingkatkan pengetahuannya. Sekolah adalah institusi yang sangat dipercaya masyarakat Indonesia untuk 'menitipkan' anak-anaknya. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) di tingkat SD dan SMP.

Selain itu, sekolah merupakan wahana efektif dalam memberikan efek tular-informasi, pengetahuan, dan keterampilan kepada masyarakat terdekatnya. Dengan demikian, kegiatan pendidikan kebencanaan di sekolah menjadi strategi efektif, dinamis, dan berkesinambungan dalam upaya penyebarluasan pendidikan kebencanaan. Upaya sistemik, terukur, dan implementatif dalam meningkatkan kemampuan warga sekolah, niscaya mampu mengurangi dampak risiko bencana di sekolah.

Pengurangan Risiko Bencana di Sekolah

Kampanye global untuk membangun ketahanan bangsa dan ketangguhan masyarakat hingga kini masih terus dilakukan. Di tahun 2010-2011 ini, UNISDR (United Nations International Strategy for Disaster Reduction) mencanangkan kampanye PRB dunia dengan fokus pada pembangunan lingkungan perkotaan. Dengan tema "*Membangun Kota yang Tangguh, Menyasar Risiko Perkotaan*", kegiatan bertema "*Kampanye Satu Juta Sekolah dan Rumah Sakit yang Aman*" dilaksanakan untuk mendorong praktik PRB di sekolah dan rumah sakit.

Di Indonesia, Planas PRB yang secara konsisten bekerjasama dengan pelbagai pemangku kepentingan, termasuk pemangku kepentingan dalam dunia pendidikan, mencanangkan kampanye nasional tahun 2010 sebagai Tahun Kampanye untuk Sekolah dan Rumah Sakit Tangguh Bencana. Dicanangkan sejak Mei 2010, kampanye

nasional tersebut juga ditindaklanjuti oleh daerah seperti di Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan beberapa provinsi lainnya.

Senafas dengan itu, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional, juga menyadari penting dan tingginya kebutuhan pengarusutamaan risiko bencana di sekolah. Didukung oleh UNDP SC-DRR dan Konsorsium Pendidikan Bencana (KPB), hal tersebut ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Edaran mengenai Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana di Sekolah. Surat Edaran No. 70a/MPN/SE/2010 tersebut ditujukan kepada para Kepala Daerah, Dinas Pendidikan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maupun dinas-dinas terkait.

Hingga kini, pelbagai inisiatif dan kegiatan untuk mewujudkan apa yang dimaktubkan dalam Surat Edaran Kemendiknas tersebut telah dilakukan para pemangku kepentingan maupun institusi sekolah. Hanya saja, diperlukan adanya suatu kerangka kerja sebagai rujukan bagi para pemangku kepentingan dalam membangun Sekolah Siaga Bencana. Oleh karena itu Kerangka Kerja Sekolah Siaga Bencana ini disusun untuk memberikan pokok rangkaian cita-cita dan implementasi dari upaya membangun kesiapsiagaan bencana di sekolah.

BAB II SEKOLAH SIAGA BENCANA

2.1. DEFINISI

Kamus Besar Bahasa Indonesia, mendefinisikan kesiapsiagaan sebagai ‘keadaan siap siaga’. Berasal dari kata dasar ‘siap siaga’, yang berarti ‘siap untuk digunakan atau untuk bertindak’. Dalam Bahasa Inggris, padanan kata ‘kesiapsiagaan’ adalah *preparedness*. Sementara definisi yang diberikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, adalah ‘serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna’.

Secara umum UN-OCHA memberikan penjelasan bahwa kesiapsiagaan adalah *aktivitas pra-bencana yang dilaksanakan dalam konteks manajemen risiko bencana dan berdasarkan analisa risiko yang baik. Hal ini mencakup pengembangan/ peningkatan keseluruhan strategi kesiapan, kebijakan, struktur institusional, peringatan dan kemampuan meramalkan, serta rencana yang menentukan langkah-langkah yang dicocokkan untuk membantu komunitas yang berisiko menyelamatkan hidup dan aset mereka dengan cara waspada terhadap bencana dan melakukan tindakan yang tepat dalam mengatasi ancaman yang akan terjadi atau bencana sebenarnya.*

Sedangkan UNISDR dalam buku Panduan tentang ‘Konstruksi Sekolah yang Lebih Aman’ (*Guidance Notes on Safer School Construction*), menyatakan bahwa *kesiapsiagaan adalah pengetahuan dan kapasitas yang dikembangkan oleh pemerintah, organisasi profesional penyelenggara tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana, masyarakat dan individu - untuk secara efektif mengantisipasi, merespon, dan pulih dari dampak peristiwa bahaya atau kondisi yang dapat terjadi dan akan terjadi.*

Dari definisi dan penjelasan di atas, dapat ditarik pengertian definitif bahwa ‘sekolah siaga bencana adalah sekolah yang memiliki kemampuan untuk mengelola risiko bencana di lingkungannya. Kemampuan tersebut diukur dengan dimilikinya perencanaan penanggulangan bencana (sebelum, saat dan sesudah bencana), ketersediaan logistik, keamanan dan kenyamanan di lingkungan pendidikan, infrastruktur, serta sistem kedaruratan, yang didukung oleh adanya pengetahuan dan kemampuan kesiapsiagaan, prosedur tetap (*standard operational procedure*), dan sistem peringatan dini. Kemampuan tersebut juga dapat dinalar melalui adanya simulasi reguler dengan kerja bersama berbagai pihak terkait yang dilembagakan dalam kebijakan lembaga pendidikan tersebut untuk mentransformasikan

pengetahuan dan praktik penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana kepada seluruh warga sekolah sebagai konstituen lembaga pendidikan.

2.2. KONSEP DASAR

Pengupayaan kesiapsiagaan sekolah terhadap bencana merupakan perwujudan dari Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN PRB) 2010-2012 (Prioritas 5) yang merupakan penerjemahan dari Prioritas 5 dalam Kerangka Kerja Aksi Hyogo 2005-2015, yaitu *memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana untuk respon yang efektif di semua tingkatan masyarakat*. Selain itu, dalam konteks pendidikan pengurangan risiko bencana, konsep dasar ini merupakan perwujudan dari Kerangka Kerja Hyogo 2005-2015, Prioritas 3 (tiga), yaitu *menggunakan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun sebuah budaya keselamatan dan ketahanan di semua tingkat*.

Dengan demikian, konsep sekolah siaga bencana tidak hanya terpaku pada unsur kesiapsiagaan saja, melainkan juga meliputi upaya-upaya mengembangkan pengetahuan secara inovatif untuk mencapai pembudayaan keselamatan, keamanan, dan ketahanan bagi seluruh warga sekolah terhadap bencana. Berdasarkan hal tersebut, maka konsep sekolah siaga bencana (SSB) memiliki dua unsur utama, yaitu:

1. Lingkungan Belajar yang Aman.
2. Kesiapsiagaan Warga Sekolah.

2.3. TUJUAN

Tujuan SSB adalah membangun budaya siaga dan budaya aman di sekolah, serta membangun ketahanan dalam menghadapi bencana oleh warga sekolah.

Budaya siap siaga bencana merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan terbangunnya SSB. Budaya tersebut akan terbentuk apabila ada sistem yang mendukung, ada proses perencanaan, pengadaan, dan perawatan sarana-prasarana sekolah yang baik. Konsepsi SSB yang dikembangkan KPB ini diharapkan akan menjadi rujukan bagi inisiatif-inisiatif PRB dan penanggulangan bencana berbasis masyarakat pada umumnya dan berbasis sekolah pada khususnya.

BAB III

PARAMETER, INDIKATOR, DAN VERIFIKASI

Untuk mengukur upaya yang dilakukan sekolah dalam membangun Sekolah Siaga Bencana (SSB), perlu ditetapkan parameter, indikator, dan verifikasinya. Parameter adalah standar minimum yang bersifat kualitatif dan menentukan tingkat minimum yang harus dicapai dalam pemberian respon pendidikan. Indikator merupakan “penanda” yang menunjukkan apakah standar telah dicapai. Indikator memberikan cara mengukur dan mengkomunikasikan dampak, atau hasil dari suatu program, sekaligus juga proses, atau metode yang digunakan. Indikator bisa bersifat kualitatif atau kuantitatif. Sedangkan verifikasi adalah bukti yang telah ditetapkan untuk menunjukkan indikator. Parameter kesiapsiagaan sekolah diidentifikasi terdiri dari empat faktor, yaitu:

1. Sikap dan Tindakan
2. Kebijakan sekolah
3. Perencanaan Kesiapsiagaan
4. Mobilisasi Sumberdaya

3.1. Sikap dan Tindakan

Dasar dari setiap sikap dan tindakan manusia adalah adanya persepsi, pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. SSB ingin membangun kemampuan seluruh warga sekolah, baik individu maupun warga sekolah secara kolektif, untuk menghadapi bencana secara cepat dan tepat guna. Dengan demikian, seluruh warga sekolah menjadi target sasaran, tidak hanya murid.

3.2. Kebijakan Sekolah

Kebijakan sekolah adalah keputusan yang dibuat secara formal oleh sekolah mengenai hal-hal yang perlu didukung dalam pelaksanaan PRB di sekolah, baik secara khusus maupun terpadu. Keputusan tersebut bersifat mengikat. Pada praktiknya, kebijakan sekolah akan landasan, panduan, arahan pelaksanaan kegiatan terkait dengan PRB di sekolah.

3.3. Perencanaan Kesiapsiagaan

Perencanaan kesiapsiagaan bertujuan untuk menjamin adanya tindakan cepat dan tepat guna pada saat terjadi bencana dengan memadukan dan mempertimbangkan sistem penanggulangan bencana di daerah dan disesuaikan kondisi wilayah setempat. Bentuk atau produk dari perencanaan ini adalah dokumen-dokumen, seperti protap kesiapsiagaan, rencana kedaruratan/kontijensi, dan dokumen pendukung kesiapsiagaan terkait, termasuk sistem peringatan dini yang disusun dengan mempertimbangkan akurasi dan kontekstualitas lokal.

3.4. Mobilisasi Sumberdaya

Sekolah harus menyiapkan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana, serta finansial dalam pengelolaan untuk menjamin kesiapsiagaan bencana sekolah. Mobilisasi sumber daya didasarkan pada kemampuan sekolah dan pemangku sekolah. Mobilisasi ini juga terbuka bagi peluang partisipasi dari para pemangku kepentingan lainnya.

Keempat parameter di atas adalah perangkat pengukuran kesiapsiagaan bencana di sekolah. Dalam pengukuran, masing-masing parameter itu tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait satu sama lainnya. Dari ukuran yang didapat dari sekolah terkait, dapat diketahui mengenai tingkat ketahanan sekolah terhadap ancaman bencana tertentu. Dalam praktiknya, kesiapsiagaan sekolah juga dipadukan dengan upaya kesiapsiagaan aparat pemerintah dan masyarakat di daerah atau lingkungan terdekat sekolah.

Secara garis besar, parameter, indikator, dan verifikasi dalam konsep SSB yang dikembangkan KPB adalah sebagai berikut:

Parameter	Indikator	Verifikasi
Sikap dan Tindakan	Tersedianya pengetahuan mengenai Bahaya (jenis bahaya, sumber bahaya dan besaran bahaya); Kerentanan; Kapasitas; Risiko dan Sejarah Bencana yang terjadi di lingkungan sekolah atau daerahnya.	Struktur dan Muatan Kurikulum (pada Dokumen I KTSP) serta Silabus dan RPP dari SKKD (pada dokumen II KTSP) yang memuat pengetahuan mengenai Bahaya (jenis, sumber bahaya dan besaran bahaya); Kerentanan; Kapasitas; Risiko dan Sejarah yang terjadi di lingkungan sekolah atau daerahnya. Kegiatan sekolah bagi peserta didik untuk mengobservasi Bahaya (jenis bahaya, sumber bahaya dan besaran bahaya); Kerentanan; Kapasitas dan Risiko yang ada di lingkungan sekolah, termasuk yang bersumber pada lokasi dan infrastruktur sekolah.
	Tersedianya pengetahuan mengenai upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi risiko bencana di sekolah.	Struktur dan Muatan Kurikulum (pada Dokumen I KTSP) serta Silabus dan RPP dari SKKD (pada dokumen II KTSP) yang memuat pengetahuan mengenai upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi risiko bencana di sekolah. Kegiatan sekolah untuk mengidentifikasi upaya yang bisa mengurangi risiko bencana termasuk didalamnya pilihan tindakan untuk melakukan relokasi sekolah atau

		retrofit gedung dan infrastruktur sekolah jika diperlukan. Sekolah secara berkala menguji kualitas struktur bangunannya.
	Keterampilan seluruh komponen sekolah dalam menjalankan rencana tanggap darurat	Komponen sekolah untuk menjalankan rencana tanggap darurat pada saat simulasi.
	Terlaksananya sosialisasi mengenai pengetahuan PRB, SSB dan kesiapsiagaan kepada warga sekolah dan pemangku kepentingan sekolah.	Jumlah sosialisasi rutin dan berkelanjutan di sekolah.
	Terlaksananya pelatihan pengintegrasian PRB ke dalam KTSP.	Jumlah pelatihan yang dilaksanakan oleh sekolah.
	Terlaksananya kegiatan simulasi drill secara berkala di sekolah dengan melibatkan masyarakat sekitar.	Frekwensi pelaksanaan simulasi drill dalam 1 tahun.
Kebijakan Sekolah	Adanya kebijakan, kesepakatan dan/atau peraturan sekolah yang mendukung upaya pengurangan risiko bencana di sekolah. Tersedianya akses bagi seluruh komponen sekolah terhadap informasi, pengetahuan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dalam hal PRB(materi acuan, ikut serta dalam pelatihan, musyawarah guru, pertemuan desa, jambore murid, dsb.)	Dokumen I KTSP (termasuk didalamnya Visi, Misi dan Tujuan Sekolah) yang memuat dan/atau mendukung upaya pengurangan risiko bencana di sekolah. Dokumen kebijakan sekolah yang memuat dan/atau mengadopsi persyaratan konstruksi bangunan dan panduan retrofit yang ada atau yang berlaku. Media informasi sekolah (contoh: majalah dinding, perpustakaan, buku, modul) yang memuat pengetahuan dan informasi PRB dan dapat diakses oleh warga sekolah. Jumlah kesempatan dan keikutsertaan warga sekolah dalam pelatihan, musyawarah guru, pertemuan desa, jambore murid, dll.
Perencanaan Kesiapsiagaan	Tersedianya dokumen penilaian risiko bencana yang disusun bersama secara partisipatif dengan warga sekolah dan pemangku kepentingan sekolah.	Dokumen penilaian risiko bencana yang disusun secara berkala sesuai dengan kerentanan sekolah. Dokumen penilaian kerentanan gedung sekolah yang dinilai/diperiksa secara berkala oleh Pemerintah dan/atau Pemda. <i>Catatan:</i> Kerentanan sekolah yang dinilai

		berdasarkan aspek struktur dan non-struktur.
	Tersedianya rencana aksi sekolah dalam penanggulangan bencana (sebelum, saat, dan sesudah terjadi bencana).	Dokumen rencana aksi sekolah yang dibuat secara berkala, direview dan diperbaharui secara partisipatif dan diketahui oleh Dinas Pendidikan setempat.
	Tersedianya Sistem Peringatan Dini yang dipahami oleh seluruh komponen sekolah, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Akses terhadap informasi bahaya, baik dari tanda alam, informasi dari lingkungan, dan dari pihak berwenang (pemerintah daerah dan BMG) ▪ Alat peringatan serta biaya pemeliharaannya dan tanda bahaya yang disepakati dan dipahami seluruh komponen sekolah. ▪ PROTAPpenyebarluasan informasi peringatan bahaya di lingkungan sekolah. ▪ Petugas yang bertanggungjawab dan berwenang mengoperasikan alat peringatan dini. ▪ 	PROTAP mengenai pelaksanaan sistem peringatan dini yangtelah diuji dan diperharui melalui kegiatan simulasi/drill yang dilaksanakan secara berkala oleh sekolah.
	Adanya Prosedur Tetap Kesiapsiagaan Sekolah yang disepakati dan dilaksanakan oleh seluruh komponen sekolah	Sekolah memiliki Protap Kesiapsiagaan Sekolah yang direview secara rutin dan dimutakhirkan secara partisipatif.
	Adanya peta evakuasi sekolah, dengan tanda dan rambu yang terpasang, yang mudah dipahami oleh seluruh komponen sekolah	Sekolah memiliki peta evakuasi dengan tanda dan rambu yang terpasang yang mudah dipahami oleh seluruh komponen sekolah dan dapat ditemukan dengan mudah di lingkungan sekolah.
	Kesepakatan dan ketersediaan lokasi evakuasi/shelter terdekat dengan sekolah, disosialisasikan kepada seluruh komponen sekolah dan orangtua murid, masyarakat sekitar dan pemerintah daerah.	Sekolah memiliki lokasi evakuasi/shelter terdekat yang tersosialisasikan serta disepakati oleh seluruh komponen sekolah, orangtua murid, masyarakat sekitar dan pemerintah daerah.

	<p>Adanya prosedur tetap kesiapsiagaan sekolah yang disepakati dan dilaksanakan oleh seluruh komponen sekolah, diantaranya meliputi/contohnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penggandaan dan penyimpanan dokumen penting sekolah pada tempat yang aman. • Pencatatan nomer telepon penting yang mudah diakses seluruh komponen sekolah (Puskesmas/rumah sakit terdekat, pemadam kebakaran, dan aparat terkait). 	<p>PROTAP kesiapsiagaan sekolah yang direview dan dimutakhirkan secara rutin dan partisipatif.</p>
	<p>Adanya peta evakuasi sekolah dengan tanda dan rambu yang terpasang, yang mudah dipahami oleh seluruh komponen sekolah</p>	<p>Peta Evakuasi Sekolah yang dapat dilihat dan dipahami oleh seluruh warga sekolah.</p> <p>Rambu dan tanda jalur evakuasi yang dapat dilihat dan dipahami oleh warga sekolah.</p>
	<p>Adanya lokasi evakuasi/shelter terdekat dengan sekolah yang disepakati dan disosialisasikan kepada seluruh komponen sekolah, orang tua siswa, masyarakat dan pemda.</p>	<p>Lokasi evakuasi/shelter terdekat yang diketahui oleh seluruh warga sekolah sebagai tempat evakuasi saat terjadi bencana.</p>

Mobilisasi Sumberdaya

Adanya bangunan sekolah yang aman terjadap bencana.

Bangunan Sekolah yang berkarakteristik sebagai berikut:

- Struktur bangunan sekolah sesuai dengan standar bangunan aman bencana
- Tata letak dan desain bangunan utama terpisah dari bangunan UKS.
- Tata letak dan desain kelas yang aman.
- Desain dan tata letak yang aman untuk penempatan sarana dan prasarana kelas dan sekolah..

Jumlah dan jenis perlengkapan, suplai dan kebutuhan dasar pasca bencana yang dimiliki sekolah.

Adanya perlengkapan dasar dan suplai kebutuhan dasar pasca bencana yang dapat segera dipenuhi dan diakses oleh warga sekolah, seperti: alat P3K dan evakuasi, terpal, tenda dan sumber air bersih.

Adanya gugus siaga bencana sekolah yang melibatkan perwakilan peserta

Jumlah peserta didik yang terlibat dalam gugus siaga bencana sekolah.

didik.

Adanya kerjasama diantara gugus guru atau forum MGMP sekolah terkait upaya PRB di sekolah.

Frekwensi dan jenis kegiatan kerjasama diantara gugus guru dan forum MGMP terkait upaya PRB di sekolah.

Adanya kerjasama dengan pihak-pihak terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana baik setempat (desa/kelurahan dan kecamatan) maupun dengan BPBD/Lembaga pemerintah yang bertanggung jawab terhadap koordinasi dan penyelenggaraan penanggulangan bencana di kota/kabupaten.

Jumlah pihak dan kegiatan kerjasama untuk upaya PRB yang dilakukan oleh sekolah.

Pemantauan dan evaluasi partisipatif mengenai Kesiapsiagaan dan keamanan sekolah secara rutin (menguji atau melatih kesiapsiagaan sekolah secara berkala).

Sekolah memiliki mekanisme pemantauan dan evaluasi partisipatif mengenai Kesiapsiagaandan keamanan sekolah secara rutin.

BAB IV
PEDOMAN PENGEMBANGAN
SEKOLAH SIAGA BENCANA

4.1. NILAI-NILAI DAN PRINSIP-PRINSIP

Dalam melaksanakan kegiatan, anggota-anggota KPB mempromosikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang diyakini akan menjamin kualitas praktik pendidikan PRB. Nilai-nilai akan menjadi pedoman baik-buruknya praktik pendidikan PRB. Sedangkan prinsip-prinsip menjadi petunjuk bagaimana praktik pendidikan PRB harus dilakukan. Nilai-nilai dan prinsip-prinsip ini diharapkan menjadi panduan bagi para pelaku (*community of practices*) maupun pemangku kepentingan dalam membangun kesiapsiagaan bencana sekolah.

Nilai-Nilai

1. **Perubahan Budaya.** Pendidikan PRB ditujukan untuk menghasilkan perubahan budaya, budaya aman (*safety*), dan *safer to resilient*.
2. **Berorientasi Pemberdayaan.** Memampukan sekolah dan warga sekolah untuk mengaplikasikan PRB secara kolektif.
3. **Kemandirian.** Mengoptimalkan pendayagunaan sumberdaya sekolah dan warga sekolah sendiri dengan meminimalkan sumberdaya luar.
4. **Right Based Approach.** Praktik pendidikan PRB selalu memperhatikan hak-hak dasar manusia.
5. **Keberlanjutan.** *Sustainability* dan institusionalisasi (pelebagaan)
6. **Menggali dan Mendayagunakan Kearifan Lokal.** Menggali dan mendayagunakan kearifan lokal dalam praktek Pendidikan PRB
7. **Kemitraan.** Berupaya melibatkan pemangku kepentingan, baik dari pelbagai komponen, sektoral, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah atau organisasi non-pemerintah untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama berdasarkan kesepakatan, prinsip kolaborasi, dan sinergi.
8. **Inklusivitas.** Memperhatikan kepentingan semua peserta didik tanpa terkecuali, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus.

Prinsip-Prinsip

1. **Interdisiplin dan Menyeluruh.** Pembelajaran untuk PRB, dapat terkandung dan terintegrasi dalam keseluruhan kurikulum pendidikan, tidak harus dilaksanakan sebagai kegiatan pelajaran yang tersendiri. Secara menyeluruh dimaksudkan bahwa proses pembelajaran antar kelompok mata pelajaran dilaksanakan secara terpadu dalam mencapai standar kompetensi yang ditetapkan.
2. **Komunikasi Antar-Budaya (Intercultural Approach).** Merupakan interaksi dan komunikasi antar-pribadi yang dilakukan oleh beberapa orang dengan latar

belakang kebudayaan berbeda (ras, etnik, atau sosio-ekonomi, atau gabungan dari semua perbedaan itu).

3. **Berorientasi Nilai.** Nilai-nilai bersama yang mendasari PRB, menjadi norma yang dianut. Namun dapat selalu dikritisi, didebat, diuji, dan diterapkan dengan adaptasi yang diperlukan.
4. **Berorientasi Tindakan.** Pengaplikasian pengalaman pembelajaran ke dalam kehidupan sehari-hari partisipan baik yang bersifat pribadi maupun profesional.
5. **Pemikiran Kritis dalam Pemecahan Masalah.** Pengembangan pemikiran kritis dan pemecahan masalah dengan membentuk kepercayaan diri dalam mengungkapkan dilema dan tantangan membangun budaya aman dan ketangguhan terhadap bencana.
6. **Multi-Methodologi.** Pendekatan yang di dalamnya memungkinkan pengajar dan pembelajar bekerja bersama untuk mendapatkan pengetahuan dan memainkan peran dalam membentuk lingkungan pendidikan mereka, tidak ada metodologi (tunggal) yang paling sesuai.
7. **Relevan dengan Kondisi Lokal.** Membicarakan persoalan lokal dan juga persoalan global dengan bahasa-bahasa yang paling umum digunakan oleh partisipan. Konsep-konsep dengan tepat disampaikan dalam budaya lokal.
8. **Partisipatif.** Pembuatan keputusan yang partisipatoris di mana peserta belajar ikut serta memutuskan bagaimana mereka akan belajar
9. **Kehati-Hatian.** Menghindari munculnya kerentanan dan ketergantungan terhadap pihak luar.
10. **Akuntabilitas.** Bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada anggota sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas juga merupakan kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban itu.
11. **Penegakan Fungsi Sekolah.** Fungsi sekolah untuk memberikan pelayanan dan pelayanan pendidikan dan atau menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar harus menjadi prioritas utama dalam keadaan darurat.

4.2. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pengurangan risiko bencana (PRB) membutuhkan upaya bersama para pihak – sesuai dengan ketersediaan, kapasitas, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki. Berikut adalah hal-hal dasar yang mungkin dapat dilakukan oleh masing-masing pihak (warga sekolah, orangtua, lembaga pelaksana kegiatan, maupun donor):

Apa yang dapat dilakukan anak-anak?

- Anak-anak dan para pemuda-pemudi dapat mengambil manfaat dari kegiatan pelatihan P2K dan PRB yang diberikan oleh lembaga/organisasi non-pemerintah

dan/atau Masyarakat Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Selanjutnya, anak-anak yang lebih dewasa diharapkan dapat juga mengajar mereka yang lebih muda.

- Anak-anak dan para pemuda-pemudi dapat menyampaikan kepada orangtua mereka apa yang mereka pelajari tentang bahaya (*hazards*) dan risiko (*risks*).

Apa yang dapat dilakukan orangtua?

- Orangtua dapat menanyakan keamanan sekolah pada saat rapat dewan sekolah. Mereka juga dapat melakukan *lobby* kepada pejabat pemerintah mengenai sumberdaya yang diperlukan untuk keamanan sekolah.
- Orangtua dapat bergabung dengan anggota komunitas lainnya untuk mendukung anak-anak mereka dalam mempelajari PRB dan membantu menyebarkan penggunaan *assessment* risiko secara partisipatif di dalam komunitas.
- Orangtua yang kehilangan anak mereka pada saat kejadian bencana di sekolah dapat bergabung dengan asosiasi atau organisasi non-pemerintah untuk melakukan apa saja yang dapat mereka lakukan untuk mencegah orangtua lain mengalami derita kehilangan yang serupa. Cara para orangtua yang pernah mengalami kehilangan anaknya mengorganisasi kegiatan akan memiliki bentuk yang beragam dan lebih cocok secara budaya.
- Asosiasi Orangtua dan Guru ada dalam berbagai bentuknya di banyak negara. Asosiasi tersebut dapat digunakan sebagai forum untuk berdiskusi mengenai apa yang dipelajari oleh anak-anak dan para pemuda/i serta bahaya (*hazard*) dan bagaimana sekolah dapat dilindungi.

Apa yang bisa dilakukan oleh para pendidik dan profesional lainnya?

- Para profesional bekerja keras untuk memperkaya pendidikan mereka dengan pengetahuan yang penting bagi pembangunan manusia yang berkelanjutan, perdamaian, keadilan, dan keamanan dengan memfokuskan pada bahaya-bahaya alam, tanpa mengurangi kerja mereka di area penting lainnya.
- Sekolah dapat berinisiatif memberikan pengajaran tentang pengurangan risiko bencana dan kebencanaan dalam 1 (satu) kali tiap minggu dalam mata pelajaran tertentu, seperti Geografi/Biologi, dan/atau membawa anak-anak ke luar kelas untuk mengenal dan menandai zona-zona berisiko dan/atau menggambar peta risiko yang ada di lingkungan sekolah mereka.

Apa yang dapat dilakukan organisasi non-pemerintah, nasional maupun internasional?

- Bersama para profesional, pendidik, anak-anak, komunitas, dan para pemuda/i, mereka dapat mengembangkan daftar aksi "*quick win*" (upaya cepat yang dapat memberikan hasil) yang dapat meningkatkan keamanan sekolah dan meningkatkan tingkat kesadaran risikodiantara warga sekolah.

- Mereka dapat mendukung koalisi dan kemitraan antar sekolah dan membangun jejaring pengetahuan antar sekolah.
- Mereka dapat mengembangkan dan menyediakan materi-materi pendidikan.

Apa yang dapat dilakukan donor?

- Memasukkan ukuran-ukuran PRB dalam pendanaan mereka untuk proyek-proyek konstruksi sekolah.
- Mendanai proyek-proyek pendidikan untuk PRB.

(Sumber: *Let Our Children Teach Us! A Review of the Role of Education and Knowledge in Disaster Risk Reduction*, ISDR System Thematic Cluster/Platform on Knowledge and Education, July 2006)

4.2. PENDUKUNG KEBERHASILAN

Selain oleh pihak sekolah sendiri, keberhasilan pengupayaan PRB dan implementasi SSB membutuhkan dukungan dan komitmen dari para pihak/aktor yang terkait, yakni adanya komitmen dari Kepala Sekolah dan warga sekolah; adanya kebijakan pemerintah yang mendukung pelaksanaan SSB di sekolah; serta adanya dukungan secara terus-menerus dari Dinas Pendidikan di wilayahnya, lembaga/organisasi terkait PRB, dan masyarakat sekitar lingkungan sekolah.

4.4. LANGKAH-LANGKAH

Beberapa lembaga anggota Konsorsium Pendidikan Bencana (KPB) berinisiatif untuk mempraktikkan dan mengembangkan Sekolah Siaga Bencana (SSB) di beberapa wilayah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan praktik-pengalaman tersebut, dapat ditemukan dan disepakati langkah-langkah dalam mengembangkan SSB, yaitu:

1. Membangun kesepahaman dan komitmen bersama antar anggota warga sekolah maupun dengan pemangkukepentingan lainnya dalam membangun SSB, dengan atau tanpa difasilitasi oleh pihak luar.
2. Membentuk Tim SSB.
3. Menyusun rencana untuk membangun SSB.
4. Melakukan analisis ancaman, kapasitas, dan kerentanan sekolah.
5. Melakukan analisis risiko sekolah terhadap bencana.
6. Menyusun peta risiko dan peta evakuasi sekolah.
7. Membuat *roadmap* atau “peta jalan” sekolah menuju SSB.
8. Pembentukan SSB dengan merumuskan kegiatan untuk meningkatkan ketangguhan sekolah terhadap bencana sesuai dengan empat parameter di atas yaitu sikap dan tindakan, kebijakan sekolah, perencanaan kesiapsiagaan, dan mobilisasi sumberdaya.
9. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program SSB.

DAFTAR ISTILAH

Ancaman

Situasi, kondisi, atau karakteristik biologis, geografis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan korban dan kerusakan.

Bencana

Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Kapasitas

Penguasaan sumberdaya, cara, dan kekuatan yang dimiliki masyarakat, yang memungkinkan mereka untuk, mempersiapkan diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana

Kerentanan

Tingkat kekurangan kemampuan suatu masyarakat untuk mencegah, menjinakkan, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak bahaya tertentu. Kerentanan dapat berupa kerentanan fisik, ekonomi, sosial dan tabiat, yang dapat ditimbulkan oleh beragam penyebab.

Kesiapsiagaan

Serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta langkah yang tepat dan berdaya guna.

Mitigasi

Serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Penanggulangan Bencana

Seluruh kegiatan yang meliputi aspek perencanaan dan penanggulangan bencana, pada sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana, mencakup tanggap darurat, pemulihan, pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan.

Pencegahan Bencana

Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.

Pengarusutamaan PRB

Proses di mana pertimbangan-pertimbangan pengurangan risiko bencana dikedepankan oleh organisasi/individu yang terlibat di dalam pengambilan keputusan dalam pembangunan ekonomi, fisik, politik, sosial-budaya suatu negara pada level nasional, wilayah daerah dan/atau lokal; serta proses-proses dimana pengurangan risiko bencana dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan tersebut

Pengurangan Risiko Bencana

Upaya meminimalisasi potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu dan dapat berupa kematian, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.

Upaya yang didukung oleh kelembagaan yang kuat dalam mengidentifikasi, mengkaji dan memantau risiko bencana serta menerapkan sistem peringatan dini dengan memanfaatkan pengetahuan, inovasi, dan pendidikan untuk membangun kesadaran keselamatan diri dan ketahanan terhadap bencana pada semua tingkat masyarakat melalui pengurangan faktor-faktor penyebab risiko bencana dan memperkuat kesiapan agar respon yang dilakukan lebih efektif.

Konsep dan praktik mengurangi risiko bencana melalui upaya sistematis untuk menganalisa dan mengelola faktor-faktor penyebab dari bencana termasuk dengan dikurangnya paparan terhadap ancaman, penurunan kerentanan manusia dan properti, pengelolaan lahan dan lingkungan yang bijaksana, serta meningkatkan kesiapsiagaan terhadap kejadian yang merugikan.

The concept and practice of reducing disaster risks through systematic efforts to analyse and manage the causal factors of disasters, including through reduced exposure to hazards, lessened vulnerability of people and property, wise management of land and the environment, and improved preparedness for adverse events (UN ISDR 2009)

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang mengurangi risiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.

Peringatan Dini

Serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

Rehabilitasi

Perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.

Rekonstruksi

Pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.

Risiko Bencana

Potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

Tanggap Darurat Bencana

Serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan bencana, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana publik.

Warga Sekolah

Semua orang yang berada dan terlibat dalam kegiatan belajar-mengajar: murid, guru, tenaga pendidikan dan kepala sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- BNPB (2008), "Implementasi Pengurangan Risiko Bencana di Indonesia, 2007-2008"
- Global Platform for Disaster Risk Reduction (2009), "Outcome Document: Chair's Summary of the Second Session Global Platform for Disaster Risk Reduction"*
- Gugus Tugas Konsorsium Pendidikan Bencana untuk Review SNP2RB (2009), "Draft Akademik Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia"
- H. Sudirman Gani (2009), "Pelaksanaan Koordinasi dari Aspek Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam Tanggap Darurat Bencana Gempabumi 30 September 2009"
- Konsorsium Pendidikan Bencana (2008), "Draft Kerangka Kerja Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Sekolah"
- Konsorsium Pendidikan Bencana (2009), "Notulen Rapat KPB: Sekolah Siaga Bencana, 17 Desember 2009"
- MPBI (2008), "Kerangka Aksi Hyogo: Pengurangan Risiko Bencana 2005-2015, Membangun Ketahanan Bangsa dan Komunitas Terhadap Bencana"
- Ninil R.M. Jannah (2009), "Kerangka Kerja Sekolah Siaga Bencana: Hasil diskusi Sesi Pembelajaran KPB tentang Sekolah Siaga Bencana"

**ANGGOTA GUGUS TUGAS KPB
UNTUK KONSEP SEKOLAH SIAGA BENCANA**

Organisasi	Nama
ASB	Melina Margaretha
ASB	Wahyu Sulastomo
HOPE World Wide	Willy Gosal
LIPI	Asep Koswara
LIPI	Irina Rafliana
LIPI	Tasril Mulyadi
LPBI NU	A. Jamil Wahab
LPBI NU	Avianto Muhtadi
LPBI NU	Sulton Huda
MDMC	Arief Nurkholis
MDMC	Budi Setiawan
MDMC	Paski Hidayat
MPBI	Barry Adhitya
MPBI	Catur Sudhira
MPBI	Faisal Djalal
NuraniDunia	Ariful Amir
PerkumpulanKerlip	Anastasia Rima H
PerkumpulanKerlip	Yanti Sriyulianti
PerkumpulanKerlip	Zamzam Muzaki
PerkumpulanLingkar	Ninil Miftahul Jannah
PerkumpulanLingkar	Yugyasmono
Plan International	Amin Magatani
Plan International	Katharina Anggraeni
PMI	Qorun Niza
PMI	Titi Daulay
Save The Children	Intan Febriani
SCDRR - UNDP	Dian Afriyanie
SCDRR - UNDP	Siti Agustini
UNDP	Malikah Amril
UNESCO	Ardito M. Kodijat
UNESCO	Betty Siagian
UNJSP-DRR	Dominica Novi Nugraheni
UNJSP-DRR	Jonathan Victor Rembeth
UNTWG-DRR UNDP	Riana Nedyawati
UNTWG-DRR UNOCHA	Titi Moektijasih

Konsorsium untuk Pendidikan Bencana

Organisasi yang dibentuk pada bulan Oktober 2006, selanjutnya disingkat menjadi KPB didedikasikan sebagai tindak lanjut dari peringatan Hari Pengurangan Resiko Bencana (Internasional) tahun 2006 dengan tema “Pengurangan Resiko Bencana Mulai dari Sekolah”. KPB bertujuan mendukung pengembangan kebijakan dan praktik pendidikan PRB di tingkat nasional dan daerah yang berkelanjutan baik formal, non formal, maupun informal melalui peningkatan kapasitas, koordinasi, dan sinergi antar pihak yang berkomitmen dalam pendidikan PRB dengan jumlah anggota sebanyak 59 organisasi yang terdiri dari badan-badan PBB, Pemerintah, Masyarakat Palang Merah, dan LSM yang melaksanakan kegiatan dalam Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Sekolah.

Sebagai organisasi jaringan, para anggota organisasi bekerja untuk saling melengkapi antara satu dengan lainnya dan juga bersama mitra lain yang relevan dengan dukungan upaya pengembangan dan pendokumentasian dari materi belajar-mengajar; sesi pembelajaran bersama dan pertukaran informasi untuk meningkatkan pengetahuan sumber daya manusia dalam hal pendidikan bencana serta menjamin tercapainya program pendidikan bencana yang berkelanjutan di Indonesia. KPB memiliki “*focal points*” untuk Pemerintah, Palang Merah Indonesia, LSM dan badan-badan PBB. Selain saling berkontribusi, para anggota juga mendapatkan keuntungan dari nilai tambah dalam hal pengembangan dan pendokumentasian praktik pendidikan PRB dan advokasi kepada pemerintah pusat dan daerah dengan dukungan mekanisme internal KPB yang lebih kuat.

Dengan maksud mengembangkan kebijakan yang memungkinkan praktek pendidikan pengurangan risiko bencana (PPRB) secara berkelanjutan dan terinstitusionalisasim maka KPB memiliki visi dan misi sebagai berikut:

Visi: Menurunnya tingkat risiko bencana di Indonesia melalui peningkatan kapasitas masyarakat dan pemangku kepentingan dalam mengelola risiko bencana

Misi: Mendukung pengembangan kebijakan dan praktik pendidikan PRB di tingkat nasional dan daerah yang berkelanjutan baik formal, non formal, maupun informal melalui peningkatan kapasitas, koordinasi, dan sinergi antar pihak yang berkomitmen dalam pendidikan pengurangan risiko bencana.

Dengan ruang lingkup kegiatan yang terdiri dari advokasi, *piloting* atau *pioneering* anggota serta pengembangan kapasitas anggota.

Dalam melaksanakan kegiatan pendidikan (untuk) pengurangan risiko bencana, anggota KPB berpanduan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang diyakini akan menjamin kualitas praktik pendidikan PRB. Nilai-nilai akan menjadi pedoman baik buruknya praktik pendidikan PRB. Sedangkan prinsip-prinsip menjadi petunjuk bagaimana praktik pendidikan PRB harus dilakukan.

Alat kelengkapan organisasi KPB selain anggota juga terdapat Presidium dan Sekretariat yang dalam periode tertentu akan berganti dengan mekanisme yang terdapat dalam internal organisasi KPB.

Informasi detail dapat diakses di www.un.or.id/untwg, www.jtic.org.

Kontak:

- Ninil R.Miftahul Jannah, Perkumpulan Lingkar, ecologidiot@gmail.com +62 81328011915
- Riana Nedyawati, UNTWG –DRR/UNDP, nedyawati@un.org, +62 8119622106

Didukung Oleh :

